

ANALISIS PERAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI PEMODERASI ATAS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN BELANJA MODAL TERHADAP IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT

Aris Primer Simanjuntak¹, Tettet Fitrijanti²
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran
aris20003@mail.unpad.ac.id

ABSTRACT

The rapid advancement of technology has significantly transformed how organizations and individuals work, communicate, and interact with stakeholders. This change necessitates the government to transform in developing and implementing digitalization in public services, known as e-Government. This study aims to identify how financial factors such as local revenue (Pendapatan Asli Daerah, PAD) and capital expenditure influence the decision-making process in the implementation of regional e-Government, and how this relationship is moderated by economic growth. The data identified secondary data, analyzed using quantitative methods through statistical testing. A purposive sampling technique was employed to identify samples in the quantitative approach, with a total of 120 data points observed. Based on the data analysis conducted, this study concludes that local revenue (PAD) has a significantly positive effect on the implementation of e-Government. Similarly, economic growth can strengthen the influence of local revenue (PAD) on the implementation of e-Government. However, according to the statistical tests, capital expenditure does not influence the implementation of e-Government.

Keywords: E-Government, digitalization, public services, local government

ABSTRAK

Perkembangan teknologi secara masif telah mengubah bagaimana cara sebuah organisasi ataupun individu dalam bekerja, berkomunikasi, dan berinteraksi antar *stakeholder*. Perubahan ini menuntut pemerintah untuk dapat bertransformasi dalam pengembangan dan penerapan digitalisasi dalam pelayanan publik, yang dikenal dengan *e-Government*. Penelitian ini bertujuan dalam mengidentifikasi bagaimana faktor keuangan seperti pendapatan asli daerah (PAD) dan belanja modal mempengaruhi pengambilan keputusan implementasi *e-Government* daerah, serta bagaimana jika dimoderasi oleh pertumbuhan ekonomi. Data yang diidentifikasi adalah data sekunder yang dianalisis dengan menggunakan metode kuantitatif, yang dilakukan melalui uji statistik. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk mengidentifikasi sample dalam pendekatan kuantitatif, dengan total data diobservasi adalah 120 data. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), berpengaruh secara positif signifikan terhadap implementasi *e-Government*. Demikian juga dengan Pertumbuhan Ekonomi mampu memperkuat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap implementasi *e-Government*. Akan tetapi, berdasarkan pengujian statistik Belanja Modal tidak mampu mempengaruhi implementasi *e-Government*.

Kata Kunci: E-Government, digitalisasi, pelayanan publik, pemerintah daerah

Article History

Received: Juli 2024

Reviewed: Juli 2024

Published: Juli 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under a

[Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[Attribution-NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Teknologi digital secara signifikan telah mengubah cara hidup manusia, cara bekerja, serta cara berkomunikasi satu sama lain. Perubahan ini memberikan makna bahwa teknologi mampu memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Pesatnya perkembangan teknologi informasi serta ekonomi digital saat ini, menjadi sebuah peluang bagi seluruh pihak seperti organisasi maupun individual untuk memanfaatkannya dalam kegiatan operasional. Seperti organisasi pemerintah, dengan fokus utama untuk memberikan pelayanan publik sebaik mungkin kepada masyarakat. Menjadi salah satu insan utama yang seharusnya mengoptimalkan perkembangan teknologi, dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi dan kemudahan akses layanan publik di masing-masing daerah otonom-nya. Hal ini karena dengan adanya penggunaan teknologi, proses pelayanan publik kepada masyarakat menjadi semakin efisien (Ishengoma et al., 2019). Transformasi sistem administrasi publik dan institusi yang sebelumnya bersifat tradisional menjadi modern telah mengubah secara struktural maupun dinamis hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani (United Nations Department of Economic & Social Affairs, 2022).

Dalam evaluasi yang dilakukan oleh United Nations transformasi sistem pemerintahan berbasis digital bukan hanya sekedar perubahan administrasi, melainkan sebagai senjata yang berkontribusi dalam pengembangan nasional dan regional serta menjadi landasan untuk membangun institusi yang lebih efektif, akuntabel, tangguh, dan inklusif di setiap tingkatan. Hal ini dikarenakan munculnya implementasi *e-Government* dapat memberikan benefit yang bersifat potensial bagi instansi pemerintah, sektor privat, serta masyarakat; dapat berupa efisiensi penggunaan biaya, memperbaiki komunikasi dan koordinasi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta peningkatan akuntabilitas pemerintah. Oleh karena itu, implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik menjadi sangat penting utamanya mencakup pelayanan publik, yang didalamnya termasuk penerapan sistem informasi, teknologi informasi dan komunikasi (Ashaye & Irani, 2019).

Secara global implementasi *e-Government* telah melalui tahapan yang panjang dan melewati banyak inovasi serta terobosan yang baru. Sebagai bentuk dedikasi untuk perkembangan teknologi, United Nation selalu memantau perkembangan *e-Government* secara global melalui pelaksanaan survei atas seluruh negara yang menerapkannya. Hasil survei yang pertama kali diterbitkan yakni pada tahun 2001, dan tahun 2022 merupakan survei yang kesebelas dilaksanakan. Di Indonesia sendiri konsep *e-Government* mulai dikenal dan diaplikasikan sejak tahun 2003, dan telah melalui perkembangan yang relatif cukup bagus. Keadaan ini tercermin dari kenaikan indeks *e-Government* (EDGI) Indonesia dari tahun 2003 hingga 2022 yang mengalami kenaikan sebesar 0.29. Kenaikan tersebut berhasil membuat Indonesia menempati urutan ke-77 atas implementasi dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (publicadministration.un.org). Prestasi ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu memanfaatkan teknologi digital dalam sistem pemerintahan dengan baik, juga membuat Indonesia naik 11 peringkat dari tahun sebelumnya yaitu di urutan 88, dan urutan 107 pada tahun 2018 (menpan.go.id). Akan tetapi, dapat dikatakan bahwa peringkat Indonesia cukup jauh dibawah jika dibandingkan dengan negara lain, seperti peringkat Singapura di urutan ke-12, Malaysia di urutan ke-53, Thailand di urutan ke-55, dan Brunei Darussalam di urutan ke-68 (United Nations Department of Economic & Social Affairs, 2022).

Dengan demikian, Indonesia diharapkan untuk terus berbenah dalam menyediakan pelayanan yang efektif, efisien, serta pelayanan yang cepat melalui penggunaan teknologi digital (Arsalan et al., 2019). Terlebih lagi, jumlah pengguna internet di Indonesia dapat dikategorikan cukup tinggi. Terbukti dari survey tahun 2023 bahwa total penduduk di Indonesia sebagai pengguna internet aktif berjumlah 215 juta jiwa dari total populasi 275 juta jiwa. Jumlah ini meningkat sebesar 1.17% dibandingkan dengan tahun lalu, dimana tahun 2022 persentase pengguna internet sebesar 77.02% (apjii.or.id). Dengan demikian, melihat jumlah pengguna internet yang cukup tinggi, pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik akan semakin

dibutuhkan di Indonesia. Hal ini dapat tercermin dengan semakin masif-nya penggunaan dan/atau pengimplementasian teknologi di lingkungan pemerintahan.

Sejalan dengan cita-cita Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terkuat kelima hingga ketujuh di tahun 2045, pengembangan infrastruktur dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu indikator penting untuk merealisasikan-nya. Melalui pelayanan yang efisien, akuntabel, dan mudah untuk diakses dapat membantu pencapaian kualitas pelayanan yang semakin bagus, sehingga dapat membantu Indonesia untuk mewujudkan cita-cita menjadi ekonomi terkuat secara global. Menurut laporan yang diterbitkan oleh Kearney dalam *Transforming Indonesia's e-Government landscape* menyebutkan bahwa untuk mewujudkan layanan publik yang efisien, transparan, dan mudah diakses, pemerintah harus bertransformasi dengan satu kesatuan layanan *e-Government*. Seperti halnya yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) bahwa keterpaduan dalam layanan digital menjadi sesuatu hal yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat (kominfo.go.id).

Akan tetapi, dalam kenyataannya jumlah dana yang dialokasikan untuk membangun infrastruktur yang mendukung pelaksanaan *e-Government* masih tergolong cukup rendah. Seperti contoh pada tahun 2020, di Indonesia dana yang dialokasikan untuk pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi hanya sebesar Rp 21 triliun dan diestimasikan hanya sebesar Rp 46 triliun pada tahun 2030 atau sebesar 0.13% dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, jumlah pengeluaran yang dialokasikan untuk TIK pada tahun 2021 hanya sebesar Rp 30.5 triliun pada APBN, atau setara dengan 2.06 miliar USD. Berbeda dengan Singapura yang mengalokasikan sebesar 3.5 miliar USD pada tahun fiskal 2020-2021 (kemenkeu.go.id). Jumlah investasi ini menunjukkan bahwa Indonesia masih perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk TIK, karena jumlah tersebut dapat dikatakan masih berbeda cukup signifikan apabila dibandingkan dengan negara-negara yang sukses dalam mentransformasikan sektor pemerintahannya.

Rendahnya alokasi tersebut dikarenakan kurangnya dana yang dapat dialokasikan untuk membangun infrastruktur terkait. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Dias (2020) bahwa ketersediaan dana menjadi salah satu faktor penting untuk memaksimalkan implementasi *e-Government* pada pemerintah daerah. Dengan demikian, apabila dana tersebut tersedia maka alokasi yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan dan/atau pembangunan infrastruktur akan semakin meningkat. Terutama dalam pengembangan infrastruktur yang berkaitan dengan pelaksanaan *e-Government*. Sebaliknya jika dana untuk pembangunan dan/atau pengembangan infrastruktur tidak tersedia akan berdampak pada bagus atau buruknya implementasi *e-Government*.

Oleh karena itu, sumbangsih PAD terhadap total pendapatan menjadi hal krusial dalam menentukan modal yang mumpuni untuk pelayanan yang baik kepada masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur implementasi *e-Government* (Oktaviani S & Arza F I, 2020). Akan tetapi dalam realitanya, persentase realisasi yang dihasilkan masih menunjukkan tingkat sumbangsih yang relatif masih kecil. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, jika dirata-ratakan dari tahun 2018 – 2022 persentase PAD hanya sebesar 25.24%. Pendapatan Asli Daerah menjadi komponen sumber pendapatan yang perlu dioptimalkan supaya dapat memberikan pelayanan dan pemberdayaan yang lebih baik serta menjadi sumber dalam perbaikan fasilitas umum. Oleh karena itu, pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengalokasikan setiap dana yang diperoleh, serta mempunyai kemandirian dalam mengendalikan dan mengelola dana atas daerah otonom-nya (Mahfuza, C. *et al.* 2023). Kemampuan ini juga termasuk dalam membuat keputusan keuangan, mengelola pendapatan dan pengeluaran, serta mempertahankan kemampuan finansial tanpa bergantung pada pihak lain, atau dalam hal ini adalah Pemerintah Pusat.

Dalam teori *stewardship (stewardship theory)* pemerintah melaksanakan tanggungjawab-nya bukan untuk kepentingan individu, melainkan untuk kebutuhan instansi atau komunitas yang dipimpin. Dengan kata lain bahwa, pemerintah yang memiliki peran sebagai *steward* mengupayakan kebutuhan organisasi di atas kepentingan individu. Dimana pemerintah

diharapkan mampu memaksimalkan dengan sebaik-baiknya penggunaan pendapatan asli daerah (PAD) untuk dialokasikan dalam rangka melengkapi sarana dan prasarana di daerah otonom-nya. Dengan demikian akan tercapai kesejahteraan masyarakat didalamnya yang berperan sebagai *principal* (Oktaviani S & Arza F I, 2020).

Berdasarkan fenomena dan realita yang diuraikan sebelumnya, menjadi faktor yang membuat penulis untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana pengaruh pendapatan yang dihasilkan untuk implementasi *e-Government*. Dengan rumusan masalah penelitian apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap implementasi *e-Government*?, apakah Belanja Modal berpengaruh positif terhadap implementasi *e-Government*?, dan apakah Pertumbuhan Ekonomi mampu memperkuat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Implementasi *e-Government*.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Stewardship

Stewardship Theory merupakan sebuah teori dimana *steward* atau manajer tidak termotivasi oleh kepentingan pribadi, melainkan motivasi yang dijalankan sesuai dengan tujuan dari para *principal* (Davis et al., 1997). Teori ini diperkenalkan sebagai sarana dalam mendefinisikan hubungan berdasarkan prinsip-prinsip perilaku lainnya (Donaldson & Davis 1989, 1991). Pada dasarnya teori ini berakar dari bidang ilmu psikologi dan sosiologi dan kemudian didesain untuk para peneliti dalam rangka menguji situasi yang mana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk melaksanakan sebuah tindakan berdasarkan keinginan terbaik dari para *principal*.

Dalam teori ini kinerja *steward* akan dipengaruhi oleh bagaimana situasi struktural mereka ditempatkan apakah memfasilitasi tindakan yang efektif, oleh karena itu, kewenangan-nya harus diperluas untuk dapat memaksimalkan manfaat adanya *steward*, karena mereka dapat dipercaya (Davis et al., 1997) Serta *steward* ingin menjadi manajer yang baik dan setia dengan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi (Donaldson & Davis, 1991; Davis et al., 1997). Hal ini dikarenakan bahwa teori ini memandang bahwa setiap penerima delegasi atau mandat sebagai *steward* lebih berfokus pada tujuan-tujuan yang sifatnya kolektif daripada tujuan individu (Schillemans & Bjurström, 2020).

Teori *Stewardship* digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana Pemerintah Daerah sebagai *steward* menjalankan kepentingan organisasi atau instansi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang berperan sebagai *principal* (Oktaviani & Arza, 2020). Pada penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pelaksanaan tugas dan tanggungjawab *steward* untuk mewujudkan kepentingan *principal*. Dengan demikian pihak *steward* diharapkan mampu menggunakan pendapatan asli daerah dengan sebaik-baiknya dalam melengkapi sarana dan prasarana di daerah otonomnya untuk kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat (Oktaviani S & Arza F I, 2020). Di samping itu, pemerintah daerah sebagai *steward* yang notabene memiliki informasi keuangan dan non-keuangan diharapkan mampu mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas terhadap masyarakat (Airu Juniantika & Wahjoe Hapsari, 2020).

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber dana yang diperoleh dan dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mencapai fungsi efektifitas dan efisiensi, pemerintah diupayakan memaksimalkan pendapatannya sehingga sumber daya yang dialokasikan untuk kepentingan pelayanan publik tercukupi (Sarjono Sipahutar & Sutaryo, 2017). Hal tersebut dikarenakan bahwa ketika kesejahteraan suatu pemerintah daerah baik, maka pemerintah tersebut akan memiliki kecukupan dana yang dapat dialokasikan untuk mendanai pelayanan publik kepada masyarakat, salah satunya terkait dengan implementasi *e-Government*. Dengan demikian, kepala daerah sebagai pemimpin di daerah tersebut akan berusaha dalam memperoleh dan meningkatkan pendapatan asli daerah-nya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan publik (Novitasari et al., 2022). Hal ini karena ketika pemerintah memiliki pendapatan asli daerah yang tinggi, maka kepala daerah akan memiliki kesempatan dalam mempertimbangkan serta

memutuskan untuk mengalokasikan dana tersebut untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana di daerahnya untuk tahun berikutnya. Dengan kata lain bahwa semakin tinggi PAD maka semakin baik implementasi *e-Government* suatu daerah, karena dalam pelaksanaan implementasi *e-Government* membutuhkan dana yang besar, sehingga ketika pemerintah memiliki PAD yang tinggi akan memiliki kemampuan dalam meluncurkan implementasi *e-Government*.

H1: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap E-Government

Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Semakin tinggi belanja modal yang dialokasikan oleh pemerintah daerah, maka implementasi *e-Government* di daerah tersebut juga akan semakin baik (Sarjono Sipahutar & Sutaryo, 2017). Hal tersebut karena ketika alokasi belanja modal pemerintah daerah meningkat, itu berarti bahwa pemerintah tersebut memiliki kemampuan dalam meningkatkan pengeluaran untuk tujuan pengembangan dan/atau pembangunan sarana dan prasarana, khususnya untuk pengembangan *e-Government* di daerah tersebut (Pontoh et al., 2018). Dalam hal ini, ketika pemerintah daerah memiliki belanja modal yang cukup tinggi maka pemerintah daerah tersebut akan dapat mempertimbangkan untuk menggunakan alokasi belanja tersebut untuk tujuan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan implementasi *e-Government* (Ikhsan et al., 2021).

H2: Belanja Modal berpengaruh positif terhadap E-Government

Peran Pertumbuhan Ekonomi dalam Memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Implementasi E-Government

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator yang didesain dalam rangka mengukur serta mengevaluasi kemajuan atau perkembangan ekonomi di suatu daerah, pengukuran kemajuan tersebut didasarkan atas besarnya perubahan pertumbuhan dari hasil regulasi nasional (Handayani & Erinos, 2020). Oleh karena itu, dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi menjadi suatu indikator yang dapat digunakan oleh para *stakeholder* seperti pemerintah dalam mempertimbangkan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan *e-Government* (Malodia et al, 2021). Ketika pendapatan asli daerah-nya tinggi dan disokong oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil, maka pemerintah daerah akan terbantu dalam membuat keputusan dalam rangka pengembangan dan pembangunan infrastruktur *e-Government*. Dalam hal ini pemerintah memiliki peran yang signifikan sebagai pihak yang mengelola serta menetapkan kebijakan, karena dalam mengembangkan *e-Government* penetapan kebijakan menjadi faktor krusial yang sangat penting untuk diperhatikan (Khrais et al, 2019). Sejalan dengan pemikiran Nour dalam Malodia et al (2021) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan moderator dari *e-Government*, karena ketika suatu negara dengan kondisi ekonomi yang kuat juga menunjukkan bahwa peringkat dari indeks kesediaan-nya yang tinggi. Hal ini dikarenakan negara tersebut mampu meningkatkan investasi terhadap infrastruktur yang berkaitan dengan pengembangan teknologi dibandingkan dengan negara dengan kondisi ekonomi lemah. Oleh karena itu, implementasi *e-Government* di daerah tersebut juga menjadi semakin bagus. Dengan demikian dapat dirumuskan kedalam hipotesis:

H3: Pertumbuhan Ekonomi memperkuat pengaruh PAD terhadap implementasi e-Government

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk menginvestigasi populasi atau sampel khusus dengan mengumpulkan data menggunakan instrumen penelitian yang tepat. Setelah itu,

dilakukan analisis data berbasis kuantitatif dengan maksud menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian dan menyimpulkan hasil pengujian tersebut (Sugiyono, 2023).

Definisi dan Operasionalisasi Variabel

Variabel Independen

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dan dipungut daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan (UU No. 33 Tahun 2004). Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud (PP No. 71 Tahun 2010).

Variabel Dependen

E-Government merupakan penggunaan infrastruktur teknologi dan komunikasi oleh pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik sehingga dapat menjangkau lebih luas, serta lebih efektif dan efisien dalam menyampaikan pelayanan publik kepada masyarakat atau bisnis (publicadministration.un.org).

Variabel Moderasi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator yang didesain dalam rangka mengukur serta mengevaluasi kemajuan atau perkembangan ekonomi di suatu daerah, pengukuran kemajuan tersebut didasarkan atas besarnya perubahan pertumbuhan dari hasil regulasi nasional (Handayani & Erinos, 2020).

Tabel 1 Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Indikator	Skala
1	<i>E-Government</i> (Y)	Indeks SPBE	Rasio
2	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Ln Total Realisasi PAD	Rasio
3	Belanja Modal	Ln Total Realisasi BM	Rasio
4	E-Government	Indeks SPBE	Rasio

Populasi dan Sample

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan sebagai unit analisis adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat. Dengan jumlah pemerintah daerah sebanyak 27, dan waktu pengamatan menggunakan waktu selama lima tahun, dengan menggunakan *lag time series*. Variabel independen dan moderasi menggunakan lag satu (lag-1), sedangkan untuk variabel dependen menggunakan data tahun berjalan. Penelitian ini menerapkan teknik *purposive sampling* yang merupakan suatu pendekatan seleksi sampel dengan mengedepankan kriteria tertentu (Sekaran & Bougie, 2016). Berdasarkan penentuan kriteria tersebut jumlah sampel yang diperoleh adalah sebanyak 24 sampel, dengan rentang waktu yang digunakan adalah lima tahun. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan sebanyak 120 data yang akan diobservasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil pengolahan terhadap 120 data yang diobservasi pada program SPSS menghasilkan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel independen dengan nilai terkecil yakni 25.34 *ln* yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Banjar pada tahun 2019 sebesar Rp 100.745.347.096, sementara nilai terbesar adalah 28.96 *ln* yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bogor pada tahun 2021 sebesar Rp 3.761.911.243.274, dengan rata-rata variabel adalah 27.1621 dan simpangan baku 0.86945. Variabel Belanja Modal (BM) berdasarkan pengujian statistik tersebut menghasilkan nilai terkecil 24.77 *ln* atau Rp 57.422.540.258 yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Banjar tahun 2020, kemudian nilai terbesar adalah 28,16 *ln* atau Rp 1.701.254.453.271 dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2021. Rata-rata variabel Belanja Modal adalah 26,8144 *ln* dengan simpangan baku sebesar 0,65427. Variabel moderasi

yaitu pertumbuhan ekonomi (MO) diukur menggunakan harga konstan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan menghasilkan nilai terkecil -3.80 pada tahun 2020 pada pemerintah daerah Kabupaten Karawang, nilai terbesar 7.85 yang mampu diraih oleh pemerintah daerah Kabupaten Cimahi pada tahun 2019, nilai rata-rata 3.6512, dan simpangan baku 2.84849. Variabel *e-Government* dengan nilai terkecil adalah 1.28 yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2019, sementara nilai terbesar adalah 4.38 yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karawang pada tahun 2022, dengan rata-rata variabel 2.8812 dan simpangan baku sebesar 0.58579.

Tabel 1.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minim um	Maxim um	Mean	Std. Deviation
PAD	120	25.34	28.96	27.1621	.86944
BM	120	24.77	28.16	26.8144	.65427
PE	120	-3.80	7.85	3.6512	2.84849
EGOV	120	1.28	4.38	2.8812	.58579
Valid N (listwise)	120				

Sumber: *Output SPSS*, diolah (2024)

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Hasil pengujian *Software SPSS* dengan melihat nilai signifikansi, dengan ketentuan bahwa apabila nilai signifikansi > 0.05 maka data berdistribusi normal, sedangkan jika nilai signifikansi < 0.05 maka data tidak berdistribusi normal. Berdasarkan data hasil pengujian tersebut, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi > 0.05 dengan nilai signifikansi dari seluruh variabel adalah 0.161, sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Tabel 1.3 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov
Test

		Unsta ndardi zed Resid ual
N		120
Normal Parameters ^a	Mean	.00000
^b	Std. Deviation	.53458
Most Extreme Differences	Absolute Positive Negative	.074 .063 -.074
Test Statistic		.074
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.161
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig. 99% Confidenc e Interval	.113 Lowe r Boun d

Upper Boun d	.121
--------------------	------

Sumber: *Output* SPSS, diolah (2024)

b. Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil pengujian tersebut koefisien yang dilihat adalah VIF dan Tolerance untuk masing-masing variabel yaitu variabel independen dan variabel moderasi, diperoleh bahwa tidak terdapat Multikolinearitas karena setiap variabel memenuhi ketentuan yaitu nilai VIF < 10 dan nilai Tolerance > 0.10.

Tabel 1.4 Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	PAD	.485	2.062
	BM	.476	2.101
	PE	.967	1.035

a. Dependent Variable: EGOV

Sumber: *Output* SPSS, diolah (2024)

c. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, data untuk variabel independen, variabel dependen, dan variabel moderasi tidak menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas. Dari hasil pengujian tersebut, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi untuk uji *glesjer*, diperoleh bahwa nilai Sig. yang diperoleh yakni $0.715 > 0.05$ yang membuktikan bahwa uji regresi yang akan dilakukan bebas dari heteroskedastisitas.

Tabel 1.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.075	3	.025	.207	.891 ^b
	Residual	13.932	116	.120		
	Total	14.007	119			

a. Dependent Variable: ABSRES

b. Predictors: (Constant), PE, PAD, BM

Sumber: *Output* SPSS, diolah (2024)

d. Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat bahwa data yang digunakan telah memenuhi syarat yakni tidak terjadi autokorelasi, hal ini dibuktikan dengan nilai Asymp. Sig (2-tailed) telah memenuhi syarat tidak terjadi autokorelasi yakni > 0.05 . Nilai Sig. yang dihasilkan atas pengujian tersebut adalah $0.359 > 0.05$.

Tabel 1.6 Hasil Uji Autokorelasi
Runs Test

Unstandardi zed Residual	
Test Value ^a	.06100
Cases < Test Value	60
Cases >= Test Value	60
Total Cases	120
Number of Runs	56

Z	-.917
Asymp. Sig. (2-tailed)	.359
a. Median	

Sumber: *Output SPSS*, diolah (2024)

Uji Regresi Linear Sederhana

Tabel 1.7 Hasil Uji Regresi Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	-1.370	2.093		-.655	.514
	PAD	.291	.083	.432	3.489	.001
	BM	-.136	.111	-.152	-1.230	.221

a. Dependent Variable: EGOV
Sumber: *Output SPSS*, diolah (2024)

$$EGOV = -1.370 + 0.291 \text{ PAD} - 0.136 \text{ BM} + e$$

Hasil persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan dengan persamaan sebagai berikut:

1. Angka -1.370 merupakan nilai konstanta yang menunjukkan nilai prediksi untuk rata-rata *e-Government* jika PAD dan Belanja Modal secara bersama-sama pengaruhnya adalah 0 (nol), seperti contoh jika PAD dan Belanja Modal sebesar 0 (nol), maka besaran *e-Government* akan sama dengan konstanta, -1.370.
2. Koefisien regresi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar 0.291 dan bernilai positif, hal ini berarti ketika terjadi peningkatan pada PAD dan diasumsikan variabel bebas lainnya konstan, maka akan terjadi peningkatan nilai *e-Government* sebesar 0.291.
3. Koefisien regresi untuk Belanja Modal adalah sebesar -0.136 dan bernilai positif, hal ini berarti ketika terjadi peningkatan skor pada Belanja Modal dan variabel bebas lainnya diasumsikan konstan, maka akan terjadi peningkatan nilai *e-Government* sebesar -0.136.

Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Berdasarkan tabel rangkuman di atas, dapat diketahui bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh adalah 3.489 dengan tingkat nilai signifikansi sebesar 0.001. Dapat dibandingkan bahwa nilai $t_{hitung} 3.489 >$ dari nilai t_{tabel} yakni 1.6579 ($t_{hitung} > t_{tabel}$), oleh sebab itu dengan tingkat kepercayaan 95% dapat diputuskan untuk menerima H_a dan menolak H_o dengan pengaruh positif signifikan. Berdasarkan analisis hasil pengujian hipotesis secara parsial (Uji t), dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap implementasi *e-Government*. Artinya, ketika terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan berdampak terhadap peningkatan implementasi *e-Government*, dan sebaliknya. Kemudian, diketahui bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh adalah -1.230 dengan tingkat nilai signifikansi sebesar 0.221. Dapat dibandingkan bahwa nilai $t_{hitung} -1.230 <$ dari nilai t_{tabel} yakni 1.6579 ($t_{hitung} < t_{tabel}$), oleh sebab itu dengan tingkat kepercayaan 95% dapat diputuskan untuk menolak H_a dan menerima H_o . dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal tidak memiliki pengaruh terhadap implementasi *e-Government*. Artinya, ketika terjadi peningkatan Belanja Modal tidak akan berdampak terhadap peningkatan implementasi *e-Government*, dan sebaliknya.

Uji Simultan (Uji F)

Berdasarkan tabel hasil pengujian tersebut, dapat diuraikan bahwa nilai F_{hitung} yang diperoleh adalah sebesar 7.686 dengan nilai Sig. F sebesar $0.001 < 0.005 (\alpha)$. Demikian juga dengan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($7.686 > 3.070$), dengan taraf kepercayaan 95% maka dapat diputuskan untuk

menerima H_a dan menolak H_o dengan pengaruh positif signifikan. Hal ini berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Implementasi *e-Government*.

Tabel 1.8 Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.742	2	2.371	7.686	.001 ^b
	Residual	36.093	117	.308		
	Total	40.836	119			

a. Dependent Variable: EGOV

b. Predictors: (Constant), BM, PAD

Sumber: *Output SPSS*, diolah (2024)Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi tersebut, diketahui bahwa nilai R^2 adalah sebesar 0.116 yang menunjukkan bahwa kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikatnya adalah sebesar 0.116 atau 11.6%. Dengan kata lain bahwa kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal secara bersama-sama memberikan kontribusi sebesar 11.6% terhadap Implementasi *e-Government*. Selebihnya merupakan pengaruh dari variabel atau faktor-faktor lain yang tidak diikutkan dalam penelitian ini, yakni sebanyak 88.4% ($1 - R^2$).

Tabel 1.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.341 ^a	.116	.101	.55542

a. Predictors: (Constant), BM, PAD

Sumber: *Output SPSS*, diolah (2024)

Uji Regresi Moderasi

Tabel 1.10 Hasil Uji Regresi Moderasi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-.499	2.035		-.245	.807
	PAD	.314	.081	.466	3.873	.000
	BM	-.198	.109	-.221	-1.818	.072
	PE	.042	.018	.202	2.338	.021
	PAD*PE	.099	.052	.163	1.909	.029

a. Dependent Variable: EGOV

$$\text{EGOV} = -0.499 + 0.314 \text{ PAD} - 0.198 \text{ BM} + 0.042 \text{ PE} + 0.099 \text{ PAD*PE} + e$$

Hasil persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan dengan persamaan sebagai berikut:

- Angka -0.499 merupakan nilai konstanta yang menunjukkan nilai prediksi untuk rata-rata *e-Government* jika PAD dan Belanja Modal, serta interaksi antara PAD dengan Pertumbuhan Ekonomi (PAD*PE) secara bersama-sama pengaruhnya adalah 0 (nol), seperti contoh jika PAD, Belanja Modal, dan PAD diinteraksikan dengan Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 0 (nol), maka besaran *e-Government* akan sama dengan konstanta, -0.499.

- Koefisien regresi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar 0.314 dan bernilai positif, hal ini berarti ketika terjadi peningkatan pada PAD dan diasumsikan variabel bebas lainnya konstan, maka akan terjadi peningkatan nilai *e-Government* sebesar 0.314.
- Koefisien regresi untuk Belanja Modal adalah sebesar -0.198 dan bernilai positif, hal ini berarti ketika terjadi peningkatan skor pada Belanja Modal dan variabel bebas lainnya diasumsikan konstan, maka akan terjadi peningkatan nilai *e-Government* sebesar -0.198.
- Koefisien regresi untuk Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 0.042 dan bernilai positif, hal ini berarti ketika terjadi peningkatan skor pada Pertumbuhan Ekonomi dengan asumsi bahwa variabel lainnya konstan, maka terjadi peningkatan nilai *e-Government* sebesar 0.042.
- Koefisien regresi yang dihasilkan jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimoderasi oleh Pertumbuhan Ekonomi (PAD*PE) menghasilkan nilai koefisien regresi sebesar 0.099 dan bernilai positif, artinya PAD yang dimoderasi oleh Pertumbuhan Ekonomi diprediksikan akan meningkatkan nilai *e-Government* sebesar 0.099.

Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Diketahui bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh adalah sebesar 1.909 dengan nilai signifikansi sebesar 0,029. Nilai t_{hitung} 1.909 > dari t_{tabel} 1,658 ($t_{hitung} > t_{tabel}$), maka dengan taraf kepercayaan sebesar 95% dapat diputuskan untuk menerima H_a dan menolak H_o dengan pengaruh positif signifikan. Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimoderasi oleh Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Implementasi *e-Government*. Artinya Pertumbuhan Ekonomi mampu memperkuat pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Implementasi *e-Government*. Dalam hal ini ketika terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan kemudian dipadukan dengan peningkatan Pertumbuhan Ekonomi akan berdampak terhadap semakin baiknya implementasi *e-Government*.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 1.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.439 ^a	.193	.165	.53539

a. Predictors: (Constant), PAD*PE, PAD, PE, BM

Diperoleh informasi bahwa nilai R^2 yang diperoleh adalah sebesar 0,193 yang menunjukkan kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikatnya atau dengan kata lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal yang dimoderasi oleh Pertumbuhan Ekonomi secara bersama-sama memberikan kontribusi sebesar 19,3% terhadap Implementasi *e-Government*, sedangkan $(1-R^2)$ 80,7% sisanya merupakan besarnya kontribusi pengaruh yang diberikan oleh faktor-faktor lainnya yang tidak diteliti. Berdasarkan hasil yang diidentifikasi, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kontribusi pengaruh yang semula 11,6% menjadi 19,3% hal ini menunjukkan jika Pertumbuhan Ekonomi sukses menjalankan fungsinya sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Implementasi *e-Government* dengan jenis *pure* moderasi.

Pembahasan Hasil Penelitian

Dampak Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Implementasi *E-Government*

Berdasarkan analisis dan uji hipotesis yang dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pengujian regresi sederhana, uji hipotesis parsial (uji t) dan uji koefisien determinasi (R^2), dapat disimpulkan bahwa Hipotesis yang diusulkan diterima, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi *e-Government*. Hal ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} 3.489 > dari nilai t_{tabel} yakni 1.6579 ($t_{hitung} > t_{tabel}$), dengan tingkat signifikansi 0.001 < dari 0.05. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka

indeks implementasi *e-Government* akan semakin meningkat yang artinya implementasi *e-Government* daerah tersebut juga semakin bagus.

Dapat diidentifikasi bahwa pengaruh positif signifikan tersebut karena Pemerintah Daerah mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan infrastruktur daerah, salah satunya *e-Government*. Pada dasarnya pelaksanaan pembangunan dan pengembangan di suatu daerah membutuhkan kecukupan dana yang tinggi, sehingga ketika kecukupan keuangan telah terpenuhi maka pemerintah daerah akan mempertimbangkan faktor tersebut dalam pengambilan keputusan implementasi *e-Government*. Dengan demikian, tinggi rendahnya tingkat pendanaan yang diukur dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), akan berdampak terhadap baik atau buruknya implementasi *e-Government*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novitasari et al (2022), Utami et al (2019), serta Winarni et al (2023). Penelitian yang dilakukan oleh Utami et al (2019) mengungkapkan bahwa pengaruh positif signifikan memiliki makna bahwa ketika pemerintah daerah ingin melakukan pembangunan dan pengembangan di daerahnya, maka pemerintah tersebut harus memastikan kecukupan dana yang salah satunya dapat bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian, ketika ketersediaan dana yang dilihat dari PAD terpenuhi atau sudah baik, maka pemerintah daerah dapat memastikan keterpenuhan biaya yang digunakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yakni melalui implementasi *e-Government*. Hal tersebut karena tingkat PAD merupakan salah satu sumber daya utama yang digunakan dalam pengembangan daerah, serta memastikan tingkat PAD tersebut dapat memaksimalkan pembangunan sarana dan prasarana daerah. Sehingga ketika PAD suatu daerah tinggi, maka implementasi *e-Government* di daerah tersebut juga semakin bagus, karena pemerintah daerah memiliki intensi dalam melakukan pembangunan dan pengembangan infrastruktur di daerahnya. Pengembangan infrastruktur tersebut utamanya adalah *e-Government* yang diimplementasikan dengan membangun sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintahan dengan mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi (Novitasari et al., 2022).

Oleh karena itu, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat diidentifikasi bahwa hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang digunakan, yakni *Stewardship Theory*. Dalam hal ini pemerintah daerah yang berperan sebagai *Steward* memenuhi kewajibannya dalam mewujudkan keinginan masyarakat yang berperan sebagai *Principal*. Pemerintah daerah mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan sebaik-baiknya untuk melakukan pengembangan dan pembangunan infrastruktur daerahnya serta melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelayanan publik. Dengan demikian kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik menjadi lebih mudah untuk diakses dan tingkat pelayanan publik di daerah tersebut menjadi lebih efisien dan efektif sesuai dengan keinginan masyarakat.

Dampak Belanja Modal terhadap Implementasi E-Government

Berdasarkan analisis dan uji hipotesis yang dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pengujian regresi berganda, uji hipotesis parsial (uji t), uji bersama-sama (uji F), dan uji koefisien determinasi (R^2), dapat disimpulkan bahwa H_a ditolak dan H_o diterima, yakni Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap implementasi *e-Government*. Hal ini dibuktikan dengan nilai $t_{hitung} - 1.230 >$ dari nilai t_{tabel} yakni 1.6579 ($t_{hitung} < t_{tabel}$), dengan tingkat signifikansi $0.221 > 0.05$. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi Belanja Modal, maka indeks implementasi *e-Government* tidak akan mengalami perubahan, yang artinya implementasi *e-Government* daerah tersebut tidak berkontraksi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian serupa yang dilakukan oleh Novitasari et al., (2022) dan Winarni et al (2023). Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap implementasi *e-Government*. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa hubungan yang tidak berpengaruh atas Belanja Modal terhadap implementasi *e-Government* dapat disebabkan oleh belum adanya peraturan yang mendukung serta alokasi belanja modal yang kurang maksimal untuk kebutuhan implementasi *e-Government*. Hal ini dapat terjadi karena

proporsi belanja modal untuk *e-Government* relatif sangat kecil dibandingkan dengan belanja aset lainnya, atau dengan kata lain alokasi Belanja Modal untuk kebutuhan implementasi *e-Government* masih belum maksimal (Winarni et al., 2023). Pendapat tersebut juga selaras dengan Novitasari et al (2022) yang mengemukakan bahwa belum adanya regulasi yang mendukung serta alokasi dana untuk kebutuhan *e-Government* kurang memadai. Hal tersebut dapat terjadi oleh karena pengembangan dan implementasi *e-Government* membutuhkan waktu yang panjang dan bertahap hingga dapat memberikan pelayanan publik yang lengkap dan lebih efisien kepada masyarakat (Novitasari et al., 2022).

Berdasarkan pengujian hipotesis ini memberikan makna bahwa komponen Belanja Modal yang diteliti dalam penelitian ini tidak dapat dipertimbangkan sebagai faktor dalam pengambilan keputusan atas implementasi *e-Government*, karena proposi Belanja Modal yang dialokasikan untuk kebutuhan dan pengembangan *e-Government* masih relatif lebih rendah dibandingkan komponen belanja modal lainnya. Oleh sebab itu, implementasi *e-Government* di daerah tersebut menjadi kurang maksimal karena ketidaktersediaan infrastruktur yang memadai, yang disebabkan oleh kurangnya realisasi belanja modal yang dialokasikan untuk pengembangan dan pembangunan infrastruktur *e-Government* ataupun komponen lain yang dapat mendukung keberlangsungan implementasi *e-Government* tersebut. Dengan demikian, pemerintah tidak dapat menggunakan komponen realisasi belanja modal sebagai faktor pengambilan keputusan terhadap implementasi *e-Government* pada tahun berikutnya. Kendati demikian, penelitian ini menyimpulkan hasil yang berbeda dengan penelitian Ikhsan et al. (2021) dan penelitian Sarjono Sipahutar & Sutaryo (2017) yang menyimpulkan bahwa Belanja Modal berpengaruh terhadap implementasi *e-Government*. Perbedaan hasil penelitian ini dapat terjadi karena beberapa faktor seperti perbedaan jumlah data yang diobservasi, tahun penelitian, fokus atau tujuan penelitian, serta lokasi penelitian.

Peran Pertumbuhan Ekonomi atas Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Implementasi E-Government

Berdasarkan analisis dan uji hipotesis yang dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pengujian regresi moderasi, uji hipotesis parsial (uji t), uji bersama-sama (uji F), dan uji koefisien determinasi (R^2), dapat disimpulkan bahwa Hipotesis ketiga (H3) diterima, yakni Pertumbuhan Ekonomi memperkuat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Implementasi *e-Government*. Hal ini dibuktikan dengan nilai $t_{hitung} 1.909 >$ dari $t_{tabel} 1,658$ ($t_{hitung} > t_{tabel}$), dan tingkat signifikansi sebesar $0,029 < 0.05$. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah, dan jika disokong oleh Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi maka indeks implementasi *e-Government* akan semakin meningkat, yang artinya implementasi *e-Government* daerah tersebut juga semakin bagus.

Pertumbuhan ekonomi mampu memperkuat pengaruh atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Implementasi *e-Government*. Hal ini dapat terjadi karena ketika kecukupan dana pemerintah daerah terpenuhi yakni Pendapatan Asli Daerah, kemudian dipadukan dengan investasi dari investor karena tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka implementasi *e-Government* daerah tersebut juga akan semakin bagus. Dengan kata lain bahwa Pertumbuhan Ekonomi mampu meningkatkan daya dorong Pendapatan Asli Daerah terhadap Implementasi *e-Government*. Oleh karena itu, faktor Pertumbuhan Ekonomi yang dipadukan dengan Pendapatan Asli Daerah merupakan faktor yang dapat dipertimbangkan dalam pelaksanaan *e-Government* suatu daerah. Dengan Pendapatan Asli Daerah yang tinggi akan dengan mudah untuk dialokasikan dalam rangka memenuhi kebutuhan implementasi *e-Government*, serta akan lebih baik jika disokong dengan adanya investasi dari investor karena tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Saksono, P B et al (2017) yang mengemukakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi atas pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Implementasi *e-Government*. Pertumbuhan ekonomi dinilai mampu memperkuat pengaruh atas Pendapatan Asli Daerah terhadap implementasi *e-Government*. Dalam penelitian tersebut dikemukakan bahwa ketika pertumbuhan

ekonomi suatu daerah tinggi, maka dapat mendatangkan investasi dari investor yang dapat digunakan dalam pengembangan dan pembangunan daerah. Dengan demikian, ketika Pendapatan Asli Daerah tersebut meningkat, dan dipadukan dengan investasi dari investor karena tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang mengalami peningkatan, akan berpengaruh terhadap implementasi *e-Government* (Saksono, P B et al, 2017). Hal ini karena pemerintah daerah memiliki kecukupan dana yang tidak hanya terbatas pada Pendapatan Asli Daerah, melainkan adanya kontribusi atas investasi dari investor yang dapat digunakan dalam pengembangan dan pembangunan daerah tersebut. Salah satu faktor yang paling krusial yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan dan pembangunan *e-Government* adalah faktor pendanaan (*financing*) (Apleni & Smuts, 2020). Oleh karena itu, faktor Pertumbuhan Ekonomi sebagai penyokong Pendapatan Asli Daerah menjadi komponen yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan implementasi *e-Government*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, dengan mempertimbangkan kedua pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan penelitian mengenai analisis peran pertumbuhan ekonomi atas pengaruh pendapatan asli daerah terhadap implementasi *e-Government*, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap implementasi *e-Government*, dengan demikian, ketika Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi, maka pemerintah cenderung memiliki intensi untuk mengembangkan *e-Government* karena ketersediaan dana yang terpenuhi. Sehingga pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat menjadi lebih optimal dengan pemanfaatan *e-Government*. Hal ini karena ketersediaan dana menjadi faktor penting dalam pelaksanaan *e-Government* di suatu daerah atau wilayah. Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap implementasi *e-Government*, dapat dimaknai bahwa semakin tinggi Belanja Modal maka kenaikan tersebut tidak berdampak terhadap indeks pelaksanaan *e-Government*. Pertumbuhan Ekonomi berperan sebagai pemoderasi atas pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Implementasi *e-Government*. Hal ini dikarenakan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi mampu mendatangkan investor dalam menanamkan modalnya untuk pengembangan dan penerapan *e-Government*. Dengan adanya pendapatan asli daerah yang tinggi, serta disokong oleh investasi dari investor oleh karena pertumbuhan ekonomi yang baik akan berdampak terhadap pelaksanaan *e-Government*, melalui peningkatan pada indeks *e-Government*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aira Juniantika, D., & Wahjoe Hapsari, D. (2020). What Motivates Internet Financial Reporting in the Public Sector? Case of a Local Government in Indonesia. In *Journal of Accounting Research* (Vol. 3, Issue 2). <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JAROE>
- Apleni, A., & Smuts, H. (2020). An e-Government Implementation Framework: A Developing Country Case Study. *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 12067 LNCS, 15–27. https://doi.org/10.1007/978-3-030-45002-1_2
- Arsalan, S., Latif, D. V., & Saadah. (2019). Public Satisfaction on Transparency of E-Government Information in Bandung City to Prevent Corruption. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 6(8). www.ijicc.net
- Ashaye, O. R., & Irani, Z. (2019). The role of stakeholders in the effective use of e-government resources in public services. *International Journal of Information Management*, 49, 253–270. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.05.016>
- Davis, J. H., David Schoorman, F., & Donaldson, L. (1997). Toward a Stewardship Theory of Management. In *Source: The Academy of Management Review* (Vol. 22, Issue 1).
- Dias, G. P. (2020). Determinants of e-government implementation at the local level: an empirical model. *Online Information Review*, 44(7), 1307–1326. <https://doi.org/10.1108/OIR-04-2020-0148>

- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Handayani, T. U., & Erinos. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2018). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*.
- Ikhsan, S., Afiah, N. N., & Yudianto, I. (2021). Analysis of Factors Affecting the Level Of E-Government Implementation in West Java. *Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi*, Vol. 5 No. 1.
- Ishengoma, F., Mselle, L., & Mongi, H. (2019). Critical success factors for m-Government adoption in Tanzania: A conceptual framework. *Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*, 85(1). <https://doi.org/10.1002/isd2.12064>
- Novitasari, E., Dewi, F. G., & Oktavia, R. (2022). Determinants of E-Government Implementation in Indonesia. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 25–33. <https://doi.org/10.9734/ajeaba/2022/v22i1930656>
- Oktaviani S, & Arza F I. (2020). Pengaruh Kompetisi Politik, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Opini Audit Terhadap Implementasi E-Government. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol.02 No.03.
- Pontoh, G. T., Rura, Y., Rahman, A., & Ibrahim, M. A. (2018). Journal of Finance and Banking Review Internet Financial Reporting of Public Institutions and E-Government as a Medium of Good Governance in Indonesia. *J. Fin. Bank. Review*, 3(3), 28–33. www.gatrenterprise.com/GATRJournals/index.html
- Sarjono Sipahutar, I., & Sutaryo, S. (2017). Faktor-Faktor Penentu Implementasi E-Goverment Pemerintah Daerah Di Indonesia. In *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* (Vol. 5, Issue 2).
- Schillemans, T., & Bjurström, K. H. (2020). Trust and verification: balancing agency and stewardship theory in the governance of agencies. *International Public Management Journal*, 23(5), 650–676. <https://doi.org/10.1080/10967494.2018.1553807>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business*. www.wileypluslearningspace.com
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method) Dengan 9 Desain* (Sutopo, Ed.). PENERBIT ALFABETA BANDUNG.
- Utami, R. D., Hapsari, D. W., & Maharadika, D. P. K. (2019). Kompetisi Politik, Pendapatan Asli Daerah dan Opini Audit Terhadap Implementasi E-Government. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*.
- Winarni, D., Fathan, I. N., & Arofah, R. U. (2023). Analysis of the Level of E-Government Implementation and Faktors That Influence It (Empirical Study of Regional Government in Central Java). *Jurnal Akuntansi*, Vol.13.